



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI**
2. Jabatan : **MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
3. NHK : **680204**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 5.511.554.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , WARISAN Rp. 393.250.000
2. Tanah Seluas 1550 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , WARISAN Rp. 519.250.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 295 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 427.020.000
4. Tanah Seluas 3450 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.800.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , WARISAN Rp. 702.660.000
6. Tanah Seluas 113 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HIBAH TANPA AKTA Rp. 160.008.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 811 m2/24 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , WARISAN Rp. 1.155.816.000
8. Tanah Seluas 1650 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , WARISAN Rp. 552.750.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 63.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA MOTOR Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, SUZUKI KARIMUN Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 180.850.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.229.316.064
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	8.984.720.064
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.984.720.064

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.